

**TANJUNGPINANG : DINAMIKA PERKEMBANGAN SEBUAH KOTA DI
KEPULAUAN RIAU (1983 – 2010)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (SI)*



Oleh:

EMELIA

89190/2007

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 31 Juli 2013**

**TANJUNGPINANG : DINAMIKA PERKEMBANGAN SEBUAH KOTA DI
KEPULAUAN RIAU 1983 - 2010**

Nama : Emelia

Bp/NIM : 2007/89190

Jurusan : Sejarah

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 31 Juli 2013

Nama Tim Penguji

Ketua : Drs. Etmi Hardi, M. Hum

Sekretaris : Hendra Naldi, SS. M. Hum

Anggota : 1.Drs. Zul Asri, M. Hum

2.Abdul Salam, S. Ag, M. Hum

3. Delmira Syafrini, S,Sos, MA

Tanda Tangan

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

ABSTRAK

Emelia : Tanjungpinang : Dinamika Perkembangan Sebuah Kota Di Kepulauan Riau tahun 1983 – 2010. *Skripsi*. Mahasiswa Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang (UNP). 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan Kota Tanjungpinang sejak tahun 1983 sampai 2010 serta mengungkapkan seberapa besar perkembangan fisik Kota Tanjungpinang dalam periode tersebut. Pertanyaan penelitian adalah 1. Bagaimana perkembangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Administratif?. 2. Bagaimana perubahan Kota Tanjungpinang dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom?. 3. Apa akibat dari perubahan status Kota Tanjungpinang terhadap perkembangan Kota Tanjungpinang secara keseluruhan?.

Penelitian ini termasuk dalam kajian sejarah kota Tanjungpinang dilakukan dengan mengikuti prosedur metode sejarah, yaitu : a). heuristik b). kritik sumber c). analisis dan interpretasi, d). penyajian hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah atau skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Tanjungpinang sebagai Kota Administratif yang sejak awal pertumbuhannya sebagai Bandar dagang dan pusat kerajaan Melayu, geliat pemerintah membangun sarana dan prasarana seperti perkembangan fisik Kota Tanjungpinang dengan dibangunnya gedung pemerintahan yang berada di Kota Lama, Bintan dan Batu IV, serta pembangunan jalan dengan pemberian nama jalan dengan nama pahlawan Nasional dan pahlawan daerah, Pembangunan sarana pendidikan yang mana sarana pendidikan adanya lembaga - lembaga pendidikan, SD, SLTP serta universitas seperti UNILAK yang di Tanjungpinang. Serta sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, mantra dan lain – lain. Pembangunan ekonomi pada Kota Administratif sektor yang paling dominan memberi sumbangan utama bagi masyarakat adalah sektor pertanian terpadu, perdagangan, hotel, komunikasi jasa dan industri. Setelah berhasil memberikan banyak perubahan diberbagai bidang, akhirnya Tanjungpinang ditetapkan sebagai kota Otonom yang membawa kota ini ketahap yang menjanjikan dengan pembangunan dan perencanaan. Seperti pembangunan gedung pemerintahan dipusatkan di Senggarang dan Pulau dampak., sarana pendidikan sudah memenuhi mutu pendidikan dan juga banyak universitas seperti UMRAH, Politeknik dan lainnya., sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan lain – lain. Sedangkan pembangunan ekonomi pada kota Otonom sektor yang paling dominan pada tahun 2006 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanjungpinang: Dinamika Perkembangan Sebuah Kota Di Kepulauan Riau (1982-2010) “**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Hendra Naldi, SS. M. Hum dan Bapak Etmi Hardi selaku ketua dan sekretaris jurusan sejarah, FIS UNP.
2. Bapak Drs. Etmi Hardi, M. Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Hendra Naldi, SS. M, Hum M.Pd selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, Abdul Salam, S.Ag, M, Hum Bapak , dan Ibu Delmira Syafrini, S, Sos, MA selaku tim penguji skripsi.
5. Seluruh Staf Dosen Jurusan Sejarah khususnya, Universitas Negeri Padang umumnya yang telah menyumbangkan ilmu yang sangat berharga kepada penulis baik lisan maupun tulisan.
6. Seluruh karyawan-karyawati Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kepada penulis.
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan orang tua, untuk itu pada kesempatan kali ini dengan sangat teristimewa dan dengan

segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Papa serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungannya baik moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terakhir untuk teman-teman mahasiswa Jurusan Sejarah BP 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak sangat diharapkan. Selanjutnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis.

Padang, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
i	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kajian Pustaka.....	8
1. Studi Relevan	8
2. Kerangka Konseptual	9
3. Kerangka Teori	12
E. Metode Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG	
A. Kondisi Geografis dan Potensi Alam.....	17
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	24
1. Penduduk.....	24
2. Mata Pencaharian	26
C. Sejarah Singkat Kota Tanjungpinang	27

1. Tanjungpinang Masa Kolonial.....	28
2. Tanjungpinang Masa Kemerdekaan.....	32

BAB III PERKEMBANGAN KOTA TANJUNGPINANG 1983-2010

A. Perkembangan Kota Tanjungpinang Sebagai Kota Administratif	
1983 – 2001.....	38
1. Perkembangan Fisik Kota Tanjungpinang tahun 1983 – 2001	46
a. Pembangunan Gedung Pemerintahan	46
b. Pembangunan Jembatan dan Jaringan Jalan	47
c. Sarana Pendidikan.....	48
d. Sarana Kesehatan	48
2. Pembangunan sosial budaya Kota Tanjungpinang tahun 1983	
- 2001	
a. Sosial Budaya	49
b. Pendidikan	
51	
3. Pembangunan Ekonomi	
52	
B. Perkembangan Kota Tanjungpinang Sebagai Kota Otonom 2001	
– 2010.....	56
1. Perkembangan Fisik Kota Tanjungpinang tahun 2001 –	
2010.....	60
a. Pembangunan Gedung Pemerintahan.....	60

b. Pembangunan Jembatan dan Jaringan Jalan	60
c. Sarana Pendidikan.....	63
d. Sarana Kesehatan	63
2. Pembangunan Sosial Budaya Kota Tanjungpinang tahun 2001 - 2010	65
a. sosial Budaya	65
b. Pendidikan	66
3. Pembangunan Ekonomi	68

BAB IV KESIMPULAN	75
--------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Kelembaban Udara di Kota Tanjungpinang 2010	18
2. Luas Panen Bahan Makanan Menurut Kecamatan	19
3. Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan	22
4. Luas wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kota Tanjungpinang Menurut Kecamatan , 2010.....	25
5. Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungpinang tahun 2009	26
6. Keadaan Sarana Kesehatan dan Tenaga Medis tahun 2008.....	49
7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Tanjungpinang tahun 2001	52
8. Wisatawan Mancanegara yang Datang Menurut Kewarganegaraan Tahun 2006.....	55
9. Keadaan Jaringan Jalan di Kota Tanjungpinang Tahun 2001.....	62
10. Banyaknya Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungpinang menurut Kecamatan tahun 2010	64
11. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan Di Kota Tanjungpinang tahun 2009	67
12. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstant Kota Tanjungpinang tahun 2004 – 2006.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Tanjungpinang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan sebagai pusat kebudayaan melayu dan lalu lintas perdagangan. Asal nama Tanjungpinang diambil dari sebuah tanjung (tanah yang posisinya menjorok kelaut yang banyak ditumbuhi sejenis pohon pinang). Pohon yang berada di tanjung tersebut yang merupakan petunjuk bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan., dimana terdapat Kerajaan Bentan yang berpusat di Bukit Batu.¹

Pulau Bintan merupakan pulau terbesar diantara pulau-pulau yang berada di kawasan Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Tanjungpinang terletak pada posisi yang strategis, yaitu berdekatan dengan Selat Malaka, dan Singapura yang merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dengan posisi yang strategis ini menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang potensial untuk mengembangkan perekonomiannya, terutama bidang perdagangan, sehingga Tanjungpinang menjadi sangat terkenal.

Sebelum kemerdekaan, di Tanjungpinang terdapat kerajaan Bentan yang berpusat Dibukit Batu, sejarah Tanjungpinang tidak terlepas dari kerajaan Melayu

¹ 10 tahun Tanjungpinang dalam foto

Johor – Riau.² Pada masa kerajaan Johor, yaitu masa Sultan Abdul Jalil Sya beliau memerintahkan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk membuka sebuah bandar perdagangan yang terletak di pulau Bintan, tepatnya di sungai Carang, Hulu sungai Riau. Bandar yang baru tersebut menjad bandar yang ramai yang kemudian dikenal dengan Bandar Riau , kawasan Tanjungpinang sangat penting sebagai kawasan penyangga dan pintu masuk Bandar Riau.

Pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Haji Fisabilillah terjadi Perang Riau dengan Belanda selama 2 tahun (1782-1784). Pada tanggal 6 Januari kapal komando Belanda “Malaka’s Wal Faren” dihancurkan, sehingga Belanda terdesak mundur dari perairan Riau, kemudian peristiwa 6 Januari tersebut di abadikan sebagai hari jadi Tanjungpinang. Pada tahun 1912 kerajaan Riau-Lingga mengalami kemunduran dan dihapuskan dari keresidenan Belanda, karena Belanda ikut campur dalam kerajaan dan memecat Sultan Riau, Sultan Riau lebih memilih untuk pindah ke Singapura dan tidak mau menandatangani surat pemecatan tersebut. Sementara Tanjungpinang tetap menjadi pusat keresidenan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Tanjungpinang direbut Jepang dari tangan Belanda dan Tanjungpinang dijadikan pusat pemerintahan Jepang di Kepulauan Riau, kemudian pada masa Belanda kembali menjajah Belanda berhasil merebut kembali dari Jepang.

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengakhiri pendudukan Belanda atas wilayah Kepulauan Riau, tahun 1950 Belanda menyerahkan wilayah Kepulauan

² Tanjungpinang dalam angka tahun 2011

Riau kepada pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UU no. 9 tahun 1957 dibentuklah Propinsi Riau dengan Tanjungpinang sebagai ibukota, namun tahun 1959 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru. Setelah lama menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif.³ Tujuan Tanjungpinang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pertumbuhan.

Perkembangan Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari peranan masyarakat maupun aparat pemerintah, dengan adanya Repelita kota Tanjungpinang melakukan pembangunan fisik berupa bangunan – bangunan perumahan, dan pertokoan di pusat perkotaan, setelah itu dilakukan pelebaran jalan. Penataan kota yang dilakukan mendapat dukungan dari masyarakat, pemilik toko dan perumahan yang ada disekitar pertokoan bersedia mengadakan pembaharuan tanpa adanya ganti rugi. Restorasi kawasan ini muncul mengiringi reaksi Anti – Cina yang berkembang pasca pemberontakan PKI tahun 1985, pusat kota yang dulunya di dominasi oleh bangunan berarsitektur Cina dibenahi agar lebih bergaya Melayu.⁴

Setelah lama menjadi Kota Administratif akhirnya Tanjungpinang menjadi Kota Otonom pada tanggal 21 juni 2001 sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2001. Saat ini Tanjungpinang menjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau dengan 4

³ Prof. Drs. Suwardi.Ms, dkk (2004). *Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau*

⁴ Jamal D. Rahman dkk. *Dermaga Sastra Indonesia Kepengarangan Tanjungpinang dari Raja Ali Haji sampai Suryatati A. Manan*. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Komodo Books.

kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Bestari, kecamatan Tanjungpinang Timur, kecamatan Tanjungpinang Kota, kecamatan Tanjungpinang Barat⁵

Sebagai kota yang sejak awal pertumbuhannya merupakan Bandar dagang, maka sarana dan prasarana yang dibangun di Tanjungpinang terutama untuk menunjang fungsi tersebut sebagai sentra perdagangan dan hubungan laut dikawasan ini. Pertumbuhan yang pesat Kota Tanjungpinang, baik dari pengembangan wilayah perkotaan, maupun penambahan penduduk terutama setelah direncanakannya program Pembangunan Lima Tahun (Pelita), membawa kosekuensi kota ini dikelola secara khusus. Bukan saja dalam hal-hal yang menyangkut administrasi pemerintahan, tetapi terlebih dalam penataan kota yang dari waktu ke waktu menuntut adanya upaya penanganan yang lebih terarah.

Perubahan status Kota Tanjungpinang menjadi Kota Otonom telah memberi peluang yang lebih besar untuk lebih berkembang sesuai dengan atribut yang disandangnya. Dengan atribut yang dimilikinya, pemerintah kota dapat lebih berperan dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka memacu perkembangan kota. bahwa perubahan status kota memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk lebih berkembang. Hal itu terbukti dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana terhadap perkembangan Kota Tanjungpinang, seperti pemukiman dan perumahan dalam penerapan rencana tata ruang wilayah kota yang telah dicanangkan.

⁵ Rida .K. Liamsi, *kota tanjungpinang(Tanjungpinang: Kerjasama Pemerintah Kota Administratif Tanjungpinang dan lembaga study social budaya Tanjungpinang 1989)* hal 47

Hal yang menarik dari penelitian mengenai sejarah Kota Tanjungpinang ini adalah **Pertama**, mengenai Kota Tanjungpinang sejauh ini belum mendapat perhatian dari sejarawan dan peneliti sejarah umumnya belum ada kajian dan karya yang membahas Kota Tanjungpinang secara kritis, yaitu suatu kajian historis tentang pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungpinang, diantara karya-karya yang ada hanyalah membahas mengenai sejarah Kota Tanjungpinang secara umum. Mengenai Kota Tanjungpinang sudah ada buku/tulisan yang berhubungan dengan Kota Tanjungpinang, diantaranya Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau yang ditulis oleh Prof. Drs. Suwardi.Ms, dkk (2004) Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau kerjasama MSI Cabang Riau, LVRI/DHD'45 Pekanbaru. Kota Tanjungpinang ditulis oleh Rida .K. Liamsi atas kerjasama pemerintah Kota Administratif Tanjungpinang dan Lembaga Study Social Budaya Tanjungpinang(1989).

Kedua, Kota Tanjungpinang merupakan Ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang menjadi salah satu daerah otonom di Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah. Menarik dikaji karena untuk menjadi Ibukota Provinsi yang baru di Indonesia, bermula dengan UU Darurat No. 19 Tahun 1957, yang ditandatangani presiden Soekarno tanggal 9 Agustus 1957 di Bali. UU Darurat No. 19 Tahun 1957 berisikan tentang pemebntukan daerah – daerah tingkata I, yakni Sumatera Barat, jambi, dan Riau. Dengan sendirinya Peraturan pemerintah pengganti UU (perpu) no. 4 tahun 1950 yang menggabungkan Sumatera Barat, jambi, dan Riau dalam suatu wadah pemerintah provinsi sumatera tengah dihapuskan. Kota Tanjungpinang dihadapkan dengan berbagai persoalan, diantaranya

pembentukan aparatur pemerintahan dan masalah pembangunan kota. Apakah Kota Tanjungpinang sudah mampu menjadi daerah otonom yang mandiri atau masih bergantung dengan pemerintah pusat.⁶

Ketiga, sebagai sebuah Kota dan ibukota provinsi, Tanjungpinang banyak mengalami berbagai kendala dan permasalahan yang harus dihadapi terutama pertambahan jumlah penduduk yang berpengaruh pada pembangunan disegala bidang. Permasalahan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah kota dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan kota. Apabila dilihat dari perkembangan pembangunan Kota Tanjungpinang pada masa awal kemerdekaan dan Orde Baru memang sudah dilakukan pembangunan-pembangunan disegala bidang, namun apabila dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan setelah otonomi daerah. Pembangunan disegala bidang sosial,ekonomi,politik dan keamanan kota tanjungpinang mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan masa-masa sebelumnya.⁷

Beranjak dari kondisi yang telah dipaparkan diatas maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk mempelajari dan membahas masalah tentang **“Tanjungpinang: Dinamika Perkembangan Sebuah Kota Di Kepulauan Riau 1983– 2010”**.

⁶ Prof. Drs. Suwardi.Ms, dkk (2004). *Perjuangan Pembentukan Provinsi Riau*. Hal 410-411

⁷ Rida .K. Liamsi, *kota tanjungpinang(Tanjungpinang: Kerjasama Pemerintah Kota Administratif Tanjungpinang dan lembaga study social budaya Tanjungpinang 1989)* hal 41

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah maka perlu ditetapkan pembatasan dan perumusan masalah penelitian. Fokus penelitian adalah perubahan status Kota Tanjungpinang, dengan batasan temporal tahun 1983 – 2010, Tahun 1983 direalisasikan Tanjungpinang sebagai Kota Administratif, sedangkan tahun 2010 pada periode ini pusat pemerintahan yang dulunya di kota lama sejak periode 2010 ini mulai difungsikan.

Untuk memeperjelas pokok permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Kota Tanjungpinang sebagai kota administratif ?
2. Bagaimana perubahan Kota Tanjungpinang dari kota administratif menjadi kota otonom?
3. Apa akibat dari perubahan status kota Tanjungpinang terhadap perkembangan kota tanjungpinang secara keseluruhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat perkembangan Kota Tanjungpinang setelah direalisasikan sebagai Kota Administratif?
2. Perkembangan sarana dan prasarana Kota Tanjungpinang ssejak tahun 1983 sampai 2010?

Berkaitan dengan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, diantaranya :

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi sumbangan bagi ilmu sejarah khususnya mengenai sejarah Kota.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pembangunan kota masa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi relevan

Sejauh ini terdapat berupa sejarah yang berkenaan dengan Kota dalam bentuk Tesis dan skripsi, diantaranya Kota Bukittinggi 1945 – 1998 perkembangan kota secara fisik dan hubungan dengan kepemilikan tanah yang ditulis oleh Zul'asri (2001) yang membahas pemilik tanah sulit melepas tanahnya untuk pembangunan Kota Bukittinggi, kemudian Rini Muliya Sari sejarah Kota Dumai yang membahas tentang perkembangan Kota Dumai sejak diresmikan sebagai Kota Administratif sampai menjadi Kota, Skripsi yang ditulis oleh Bleen Dina Mary Mariana situmpul tentang *Sekitar Pembentukan Kepulauan Mentawai*, yang mengkaji tentang aspek pembentukan kabupaten kepulauan Mentawai dan keadaan Mentawai setelah menjadi kabupaten. Selanjutnya Skripsi Fetri Dewi yang berjudul *Perkembangan Solok Selatan (1969 -2003)* juga mengkaji tentang

perubahan status pemerintahan menjadi suatu kabupaten baru yang lebih fokus kepada perkembangan fisik dan ekonomi penduduk. *Perkembangan Fisik Kota Pekan Baru Sebagai Kota Minyak* ditulis oleh Dian Lestari (2002), yang membahas tentang perkembangan fisik Kota Pekan Baru sehubungan dengan sumber ekonomi yang di milikinya terutama pertambangan minyak.

2. Kerangka konseptual

Kota mempunyai cakupan yang luas yang mengandung banyak dimensi sehingga sulit untuk merumuskan suatu definisi yang tepat untuk kota. Meskipun dalam praktek orang umumnya telah tahu dan mengerti wujud dari kota dan biasanya dapat dengan cepat mana yang kota dan mana yang desa. Karena itu masing-masing para ahli mengemukakan definisi menurut disiplin ilmu dan sudut pandangnya. Menurut Roesdibjono, (1984:8) bahwa: Kota adalah tempat konsentrasi penduduk dengan segala aktifitasnya, pemusatan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan administrasi, pusat-pusat penyediaan fasilitas industri, perdagangan, modal, skill dan lain-lain, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan bagi penunjang daerah belakang/hinterlanya.

Sartono Kartodirjo, (1992:13) mendefinisikan kota sebagai pertumbuhan sebuah kota dari masa ke masa, sebagai pusat permukiman, tempat terjadinya beberapa kegiatan berupa pelayanan pemerintahan, pemetantasan kesenian, proses produksi dan lain-lain. Perkembangan kota akan terjadi karena adanya pembangunan.

Adapun beberapa jenis kota berdasarkan fungsinya menurut Gist, N.P dan Halbert, L.A yaitu⁸:

1. Kota berfungsi sebagai pusat industri

Dalam kegiatan industri merupakan kegiatan yang menonjol dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bukan industri.

2. Kota berfungsi sebagai pusat perdagangan

Ditinjau dari kehidupan kotanya, sebenarnya setiap kota merupakan pusat perdagangan. Namun demikian, tidaklah semua kota selalu ditandai atau diwarnai oleh kegiatan perdagangan semata. Kota-kota perdagangan yang besar biasanya merupakan kota-kota pelabuhan. Hal ini disebabkan karena kota yang bersangkutan mempunyai kemungkinan beraktifitas jauh lebih besar daripada kota-kota lain yang bukan pelabuhan, terutama ditinjau daripada pintu gerbang transportasinya. Contoh kota perdagangan besar yang bertaraf internasional antara lain: New York, London, dan Hongkong.

3. Kota berfungsi sebagai pusat rekreasi

Merupakan pemukiman yang dibangun terutama untuk rekreasi termasuk kegiatan yang bersifat fisik, mental dan budaya, umumnya terdapat fasilitas hotel, penginapan, rumah makan dan toko cenderamata, dll. Kota pariwisata dibangun pada tempat-tempat dengan udara sejuk, pemandangan alam indah atau memiliki peninggalan sejarah dan budaya. Contoh Lembang (Jawa Barat),

⁸ Hadi Sabari Yunus. 2005. *Klasifikasi Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Berastagi (Sumatera Utara), Kaliurang (Yogyakarta), Denpasar dan kota-kota lainnya di Bali.

Konsep-konsep yang terkait adalah otonomi daerah / daerah otonom. Pemerintahan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Benyamin Hoesein (1993) otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Dan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kajian Teoritis

Kota menunjukkan suatu fenomena yang kompleks, selain mencakup aspek fisik seperti geografis dan ekologi juga mencakup aspek non fisik, seperti : politik, sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan budaya. Kota juga mencakup aspek historis, karena kota tumbuh dengan seiring dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Menurut Raharjo untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perkembangan kota dapat dianalisis dengan menggunakan teori sektor yang dikembangkan oleh Hoyt.⁹ Kota Tanjungpinang termasuk dalam teori sektor, yang dikemukakan oleh Hoyt, Teori ini mengidentifikasi 5 pola lingkungan sektor, yaitu:

⁹ Freek Colomblin, *Poco Poco Kota Padang*

1. Daerah pusat bisnis yang merupakan daerah sentral dari suatu kota yang terdiri atas bangunan – bangunan kantor, hotel, Bank dan pusat perbelanjaan seperti Matahari di jalan pemuda
2. Daerah industri (daerah kelas satu) yang berada di wilayah batu 9
3. Pemukiman para karyawan (pekerja) yang berada di wilayah batu 15
4. Pemukiman masyarakat berada dikampung Bugis
5. Daerah elit yang berada di jalan pemuda.

Secara singkat teori ini menyatakan bahwa daerah-daerah kelas satu cenderung berada di tepian terluar dari suatu atau lebih sektor. Pada saat terjadinya perkembangan kota, daerah-daerah kelas satu tersebut semakin menggeser keluar, tetapi tetap berada di sepanjang sektor dan tidak membentuk lingkaran. Daerah industri berkembang di sepanjang lembah sungai, jalan kereta api dan tidak dalam bentuk daerah lingkaran di sekitar daerah pusat bisnis.

Keadaan geografis mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik dari sebuah kota. Apabila kota ingin dijadikan sebagai tempat pengembangan kegiatan niaga maka kota mestinya berlokasi di tepi pantai atau sepanjang tepi sungai. Namun apabila kota diharapkan menjadi pusat perbelanjaan dan pelayanan komersil untuk daerah pertanian, mestinya ditempatkan pada lokasi yang dekat dengan daerah pusat pertanian dan pemukiman¹⁰.

Kota Tanjungpinang memiliki letak geografis yang cukup strategis yang berdekatan dengan negara Singapura, sebagai jalur untuk kegiatan perniagaan dari

¹⁰ Branch, Mellville C. *Perencanaan Kota Komprehensif*. Yogyakarta. Gajah Mada University.1995. hal :37-38

beberapa kota pantai di Propinsi Kepulauan Riau dan juga luar Kepulauan Riau, bahkan jalur perdagangan antar pulau dan juga luar negeri.

Slamet Riyadi menganalisa 3 faktor yang menyebabkan perkembangan sebuah kota, yaitu¹¹:

1. Faktor alami, dapat dianggap sebagai faktor yang relatif statis. Hal ini bukan berarti bahwa faktor alami itu tidak mengalami perkembangan, namun segala bentuk perubahan yang terjadi berlangsung dalam waktu yang relatif lama.
2. Faktor kependudukan dan aspek sosial ekonominya, yang mempunyai sifat jauh lebih dinamis dibandingkan dengan faktor di atas. Sehubungan dengan kuantitas penduduknya perkotaan ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota, yaitu:
 - a. Pertambahan alami dari penduduk kota. Pertambahan ini dihitung dari banyak kelahiran dikurangi dengan banyaknya kematian dari penduduk kota.
 - b. Pertambahan penduduk yang disebabkan karena adanya pendatang (urbanisasi).
3. Faktor budi daya, maksudnya adalah suatu tingkat kepandaian manusia dalam usahanya untuk mengelola lingkungannya dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya.

Kota dalam perkembangannya dapat dilihat dari masyarakatnya. Kota selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara administrasi baik dari segi fisik maupun non fisik. Menurut Jorge Hondoy ada 7 Kriteria kota, yaitu

¹¹ Bakaruddin. *Studi Perkembangan dan Peremajaan Kota*. FPIPS IKIP Padang. 1994 hal:42

1. Mencapai kepadatan tertentu
2. Jenis struktur dan tata ruangnya
3. Merupakan tempat manusia tinggal dan bekerja
4. Memiliki fungsi minimal, seperti adanya pasar, pusat administrasi dan lain-lain.
5. Mempunyai penduduk heterogen yang diklasifikasikan secara hirarkis
6. Merupakan suatu pusat ekonomi yang memiliki hubungan dengan daerah pertanian.
7. Merupakan pusat pelayanan bagi daerah-daerah yang berada di sekitarnya.

Pada umumnya semua kriteria kota di atas dimiliki oleh Kota Tanjungpinang. Pembangunan Kota Tanjungpinang mempunyai arti penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota, baik bagi masyarakat Tanjungpinang pada umumnya maupun bagi masyarakat kota itu sendiri.

E. Metode Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian sejarah yang tersusun dalam 4 tahapan yaitu Heuristik, kritik sumber, interpretasi data dan historiografi.

Pada tahap pertama, yaitu heuristik merupakan tahap mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber data sejarah, baik primer, maupun sekunder. Sumber primer berupa dokumen yang diambil peneliti melalui dinas BAPPEDA dan BPS dan arsip – arsip di badan kearsipan Kota Tanjungpinang dan arsip di provinsi Kepulauan Riau, sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan staff bagian tata ruang dan kota tanjungpinang dan staff badan kearsipan., buku, artikel, makalah dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, pengumpulan sumber sekunder dilakukan melalui studi perpustakaan UNP, labor jurusan sejarah dan perpustakaan UNAND.

Pada tahapan kedua dilakukan kritik sumber yakni tahapan pengolahan data, kritik sumber dibedakan dalam bentuk eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu penguji otentisitas (keaslian) materialnya, sedangkan kritik internal untuk menguji dan membandingkan informasi sejarah yang terkandung didalamnya. Kedua tingkat pengolahan ini bertujuan untuk menyeleksi dan menyingkirkan bagian – bagian data yang tidak otentik (keaslian) dan kemudian menyimpulkan kesaksian yang bisa dipercaya dari bagian yang telah diseleksi dari data otentik¹²

¹² Mestika Zed, *metodologi sejarah*. UNP hal 37

Tahapan ketiga adalah analisi – analisis dan menginterpretasi informasi yang telah diseleksi. Sumber – sumber sejarah yang telah disaring lewat kritik sumber dipilah – pilah sehingga diperoleh butiran – butiran informasi yang dibutuhkan berupa fakta – fakta yang kemudian diangkat dan diolah sesuai pokok persoalan penelitian.

Tahap keempat adalah penyajian hasil penelitian dalam bentuk penulisan ilmiah (skripsi).